

Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah, Serta Proporsi Belanja Modal Pemerintahan Kota Banjarmasin

Lisandri dan Hj. Henny Septiana Amalia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin
Jl. H. Hasan Basry no. 9-11 Kayutangi Banjarmasin 70123, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Independence, Regional Financial Effectiveness, Capital Expenditure

Abstract

This study aims to: (1) analyze and measure the regional financial independence (KKD) of the Banjarmasin city government in 2012-2017; (2) Analyze and measure the effectiveness of regional finance of the Banjarmasin city government in 2012-2017; (3) Analyzing and measuring the proportion of Banjarmasin city government capital expenditure in 2012-2017 ; (4) Analyze and measure the trend of regional financial independence (KKD) of the Banjarmasin city government in 2012-2017; (5) Analyze and measure the trend of effectiveness and local revenue of Banjarmasin city government in 2012-2017; and, (6) Analyzing and measuring the trend of the Banjarmasin city government capital expenditure allocation in 2012-2017. The method used is descriptive statistics with regional financial performance ratio analysis techniques. Based on the results of the Performance Evaluation of Government Administration conducted by the Ministry of Home Affairs, the city of Banjarmasin received a high to very high performance status during 2012-2017. In 2015, it was ranked 28th out of 30 highest cities nationwide. The lowest achievement was obtained in 2012, namely ranking 57 out of 91 cities. This shows that the administration of government has been going well, and in general public services carried out by the government have been carried out well and have met the predetermined performance standards. The results showed that although the performance of government administration was classified as good and received a very high status, the city of Banjarmasin was not yet able to have a good financial performance, especially in the aspects of independence, effectiveness in the achievement of PAD revenues, and the proportion of capital expenditure allocation that was below 30 percent.

✉ Corresponding Author:

Lisandri:

Tel. /Fax. 081255060999

E-mail: lisandri@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

© 2020 STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved. Peer review under responsibility of STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pasca krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia memasuki era baru sistem politik dan pemerintahan dengan melakukan reformasi di segala bidang. Khususnya reformasi di bidang keuangan negara dan otonomi daerah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme-

rintah Pusat dan Daerah. Reformasi telah mengubah pengelolaan negara, seperti adanya tuntutan *Good Governance* dan pemisahan secara tegas kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuntutan tersebut dipenuhi dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1999.

Perubahan ini secara dramatis men-

gubah sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah yang sebelumnya sentralistis menjadi desentralistis. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas ini mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Halim, 2012).

Selanjutnya, Halim (2012) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, adalah memiliki (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah masih rendahnya penerimaan PAD, sementara di sisi lain potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup melimpah dan potensial untuk dikembangkan. Begitu pula dengan kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan daerah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Banjarmasin. Kemampuan suatu daerah menggali

PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di sektor publik secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan di sektor publik yang baik, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi alokasi belanja pada fasilitas, sarana dan infrastruktur.

Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik merupakan salah satu indikator capaian kinerja layanan publik (Kelly, 2015). Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Merina dan Sari, 2016). Namun, anggaran belanja modal daerah dalam rangka menjalankan otonomi umumnya terkendala faktor kemandirian daerah.

Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain. Selama ini pemerintah daerah juga masih bergantung pada pemerintah pusat dalam mendukung pendanaan pembangunan. Indikator kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman. Sumber daya keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah

akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Dalam rangka memenuhi tuntutan *good governance* pada pemerintahan daerah, penganggaran atas belanja modal harus dilakukan dalam konteks pengendalian yang terukur dan berbasis kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio keuangan daerah yang berguna untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatannya, dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2012).

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS), menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam perwujudan *good governance*. Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai (IFAC, 2016). Aspek kinerja keuangan daerah otonom yang sangat penting untuk diketahui adalah aspek kemandirian keuangan daerah otonom dan efektivitas keuangan daerah otonom sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan. Berdasarkan latar belakang ini, maka motivasi penelitian ini adalah menganalisis bagaimanakah kemandirian dan efektivitas keuangan daerah, serta proporsi alokasi belanja modal kota Banjarmasin periode 2012-2016. Cakupan penelitian yang dilakukan meliputi kemandirian dan efektivitas keuangan daerah, serta alokasi belanja modal tiap-tiap tahun dan tren masing-

masing rasio dari tahun ke tahun. Tren kinerja keuangan ini perlu diteliti karena masing-masing rasio pada tiap-tiap tahun bisa saja belum menunjukkan persentase yang menggembirakan, namun memiliki arah perkembangan yang positif.

Pemerintah kota Banjarmasin harus mampu meningkatkan penerimaan PAD melalui optimalisasi potensi yang dimiliki. Penerimaan yang berasal dari PAD kota Banjarmasin tergantung pada efektivitas perolehan PAD. Di sisi lain, kota Banjarmasin sebagaimana daerah lainnya di Indonesia harus berusaha melepaskan ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, dengan cara meningkatkan kemandiriannya, serta memprioritaskan alokasi anggaran penerimaannya ke dalam alokasi belanja modal secara optimal. Berdasarkan hal ini rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kemandirian keuangan daerah (KKD) pemerintah kota Banjarmasin tahun 2012-2017?; (2) Bagaimanakah efektivitas keuangan daerah pemerintah kota Banjarmasin tahun 2012-2017?; (3) Bagaimanakah alokasi belanja modal pemerintah kota Banjarmasin tahun 2012-2017?; (4) Bagaimanakah tren kemandirian keuangan daerah (KKD) pemerintah kota Banjarmasin tahun 2012-2017?; (5) Bagaimanakah tren efektivitas dan pendapatan asli daerah pemerintah kota Banjarmasin tahun 2012-2017?; dan, (6) Bagaimanakah tren alokasi belanja modal pemerintah kota Banjarmasin tahun 2012-2017?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian ini menggambarkan fenomena atau karakteristik data kuantitatif yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016).

Sampel penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2012 - 2017.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari laporan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti, serta sumber lain seperti dari BPS, publikasi elektronik di situs Kementerian Keuangan RI (Sekaran dan Bougie, 2016).

Analisis terhadap data kuantitatif penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran rasio-rasio dan tren keuangan daerah yang telah lazim digunakan sebagai berikut.

a. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai secara mandiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

b. Efektivitas keuangan daerah (EKD)

Efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kriteria Efektivitas PAD menurut (Mahmudi, 2013) adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif

- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.

- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

c. Alokasi Belanja Modal (Alokasi BM)

Analisis ini mengukur bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi pendapatannya pada belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka akan semakin baik. Karena salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Alokasi belanja modal ditujukan untuk pemeliharaan dan perluasan aset tetap pemerintah daerah yang memberikan keuntungan jangka panjang. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi kualitas pembangunan manusia, serta produktivitas secara ekonomis.

Kriteria pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012 mengatur bahwa untuk meningkatkan produktivitas daerah, belanja modal harus dialokasikan minimal 30 persen dari pendapatan (Syam, dkk., 2018b). Apabila belanja Alokasi BM $\leq 30\%$, maka dapat dikategorikan *tidak sesuai*, sedangkan apabila Alokasi BM $\geq 30\%$, maka dapat dikategorikan *sesuai*.

d. Tren Kemandirian Keuangan Daerah

Tren kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah kecenderungan turun atau naiknya rasio kemandirian keuangan daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan dinyatakan dalam bentuk persentasi bertanda positif (kenaikan) atau negatif (penurunan). Untuk menggambarkan kecenderungan ini lebih mudah dipahami apabila digambarkan dengan grafik.

e. Tren efektivitas keuangan daerah (Tren EKD)

Analisis tren efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah per-

kembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan dinyatakan dalam bentuk persentasi bertanda positif (kenaikan) atau negatif (penurunan). Untuk menggambarkan kecenderungan ini lebih mudah dipahami apabila digambarkan dengan grafik.

f. Tren Proporsi Alokasi Belanja Modal (Tren ABM)

Tren proporsi alokasi belanja modal (Tren ABM) digunakan untuk mengetahui arah kecenderungan turun atau naiknya rasio proporsi ABM tersebut. Kenaikan atau penurunan dinyatakan dalam bentuk persentasi bertanda positif (kenaikan) atau negatif (penurunan). Untuk menggambarkan kecenderungan ini lebih mudah dipahami apabila digambarkan dengan grafik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Indonesia setiap tahun mengeluarkan publikasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), yang dilakukan oleh Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri). Evaluasi kinerja didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah no. 6 tahun 2008, pemerintahan daerah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah pusat. EKPPD merupakan penilaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Tinggi rendahnya skor EKPPD menunjukkan bagaimana pemerintah daerah melakukan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai berarti penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah.

Tabel 1. Peringkat dan Status Kinerja EKPPD Kota Banjarmasin 2012-2016

Tahun	Peringkat dari 91 Kota	Skor	Status Kinerja
2012	57	2,2487	Tinggi
2013	31	2,8935	Tinggi
2014	41	2,8638	Tinggi
2015	28	3,0889	Sangat Tinggi
2016	40	3,1391	Sangat Tinggi

Sumber: KEPMEN DAGRI No. 100 - 279 Tahun 2012, No. 120 - 2818 Tahun 2013, No. 120-251 Tahun 2014, No. 120 - 4761 Tahun 2014, No. 800-35 Tahun 2016, No. 120 - 10421 Tahun 2016, No. 100 - 53 Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kota Banjarmasin memperoleh status kinerja tinggi hingga sangat tinggi selama tahun 2012-2017, sebagaimana dapat dilihat pada. Dilihat dari peringkatnya, maka peringkat tertinggi diperoleh pada tahun 2015, yaitu peringkat 28 dari 91 kota di Indonesia, artinya termasuk peringkat 30 kota tertinggi nasional. Capaian yang terendah diperoleh pada tahun 2012, yaitu peringkat 57

dari 91 kota. Dilihat dari skor tertinggi, maka kota Banjarmasin memperoleh skor 3,14 pada tahun 2017. Baik dari sudut pandang peringkat maupun skor, pada tahun 2015 dan 2016 kota Banjarmasin memperoleh status sangat tinggi. Analisis ini menunjukkan adanya kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Banjarmasin. Hal ini juga menun-

jukkan secara umum pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah dilakukan secara baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Metode penilaian EKPPD menggunakan total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meru-

jakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi; indeks capaian kinerja; indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja dinilai berdasarkan indeks kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah Provinsi dan Pinjaman (BPP)	Rasio KKD	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2012	Rp138.086.121.906,93	Rp1.057.916.760.549,00	13%	Rendah sekali	Instruktif
2013	Rp167.313.762.016,96	Rp195.000.000.000,00	86%	Tinggi	Delegatif
2014	Rp216.427.691.789,61	Rp1.191.239.516.914,00	18%	Rendah Sekali	Instruktif
2015	Rp225.821.059.655,57	Rp1.166.606.185.547,00	19%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	Rp247.258.423.246,06	Rp1.262.706.618.815,00	20%	Rendah Sekali	Instruktif
2017	Rp324.977.988.614,18	Rp1.154.965.157.779,00	28%	Rendah	konsultatif

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (data diolah)

Tabel 3. Proporsi Alokasi Belanja Modal Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Alokasi Belanja Modal	Kriteria
2012	Rp306.321.281.740,00	Rp966.997.956.792	31,7%	Sesuai
2013	Rp410.146.409.582,00	Rp1.253.358.346.700	32,7%	Sesuai
2014	Rp323.683.819.414,00	Rp1.369.261.000.001	23,6%	Tidak
2015	Rp348.892.929.938,97	Rp1.469.417.927.302	23,7%	Tidak sesuai
2016	Rp359.361.524.199,36	Rp1.508.186.414.715	23,8%	Tidak sesuai
2017	Rp227.067.328.775,00	Rp1.315.121.286.015	17,3%	Tidak sesuai

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (data diolah)

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Pemerintah Kota Banjarmasin

Kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai diri sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, serta retribusi sebagai sumber pendapa-

tan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Penilaian rasio KKD ini diukur berdasarkan kriteria kemandirian. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa kemampuan pemerintah kota Banjarmasin dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat pada tahun 2012 adalah 13 persen, masuk kategori rendah sekali (< 25%) dan tergolong instruktif. Pada tahun 2013 sebesar 86 persen, masuk kategori tinggi (> 75%) dan tergolong delegatif, artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Namun pada 2014 kembali menurun tajam hingga menjadi sebesar 18 persen dan terkategori rendah sekali, serta bersifat instruktif, artinya terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana perimbangan, begitu pula pada tahun 2015, dan 2016. Namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar 28 persen, tetapi masih termasuk katagori konsultatif. Ini menunjukkan kemandirian pemerintah kota Banjarmasin terus meningkat, namun masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.

Efektivitas Keuangan Daerah (EKD) Pemerintah Kota Banjarmasin

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen, semakin tinggi persentasi yang dicapai maka semakin efektif capaian realisasi PAD nya.

Dari Tabel 2. Efektivitas keuangan daerah yang diperoleh kota Banjarmasin selama tahun 2012 - 2017 berfluktuatif, pada tahun 2012 sebesar 110 persen, tahun

2013 sebesar 106 persen, dan tahun 2014 sebesar 100 persen. Di tiga tahun pertama ini EKD menunjukkan kinerja yang efektif meskipun secara persentasi terjadi penurunan. Namun sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 terjadi penurunan kinerja, capaian PAD selama tiga tahun terakhir mengalami perubahan status yaitu tidak efektif, meskipun pada tahun 2017 capaian sebesar 100 persen cukup menunjukkan upaya signifikan untuk menjadi efektif lagi.

Sebagaimana diketahui, besaran perolehan PAD selain menunjukkan kinerja pemerintah, juga menggambarkan kontribusi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. Tingginya pemasukan dari pajak daerah dan retribusi daerah juga ditentukan oleh dinamika kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penurunan PAD juga dapat menggambarkan dampak penurunan kinerja perekonomian baik secara lokal, regional, maupun nasional. Kondisi makro ekonomi ini dapat dikatakan menjadi penyebab utama, sebab sejak tahun 2014 pertumbuhan ekonomi menurun berada di bawah lima persen, dari tahun sebelumnya yang tumbuh rata-rata enam persen.

Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Banjarmasin

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

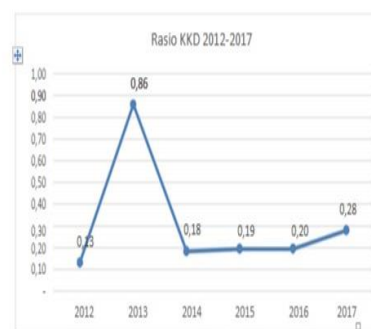
Rasio belanja modal terhadap belanja daerah adalah ukuran untuk melihat kualitas belanja daerah, karena porsi besar bel-

anja modal ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non fisik. Semakin besar proporsi belanja modal terhadap belanja daerah, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh persen) dari belanja daerah. Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal dari tahun 2012 hingga 2017, proporsi belanja modal kota Banjarmasin nampak pada Tabel 3. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang menunjukkan proporsi belanja modal sebesar 32,7 persen, ini sesuai dengan kriteria minimal 30 persen sebagaimana ditetapkan Kemendagri. Tetapi pada tahun-tahun setelahnya terus menurun, bahkan tahun 2017 hanya mencapai 17,3 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran belanja banyak terserap untuk pembiayaan lainnya di luar infrastruktur.

Analisis Tren Kinerja Keuangan Kota Banjarmasin

Tren Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Analisis Tren atau kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting untuk mengetahui arah perkembangan kemampuan keuangan yang menggambarkan keberhasilan daerah otonom dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Suatu daerah otonom pada suatu tahun tertentu bisa jadi belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat tren positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.



Gambar 1. Rasio KKD 2012-2017

Gambar 1. Rasio KKD 2012-2017

Pada Gambar 1. menunjukkan rasio KKD yang menggambarkan capaian kinerja kemampuan keuangan daerah dengan mengurangi peran pemerintah pusat. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang selanjutnya diikuti penurunan hingga tahun 2017. Dari gambar ini dapat dilihat puncak kinerja kemampuan keuangan ini ada di tahun 2013 dalam enam tahun. Tren turun-naiknya kinerja. Nampak ada kecenderungan menaik lagi tetapi tergantung pada kemampuan pemerintah merealisasikan potensi penerimaan yang lebih besar.

Tren Efektivitas Keuangan Daerah (EKD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012- 2017

Kemampuan daerah dalam merealisasikan target penerimaan asli daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Tren EKD kota Banjarmasin selama 2012-2017 menggambarkan arah yang hampir lurus, meskipun terdapat penurunan, namun secara rata-rata tren EKD mencapai 100%. Meskipun secara rata-rata kinerja pemerintah kota tergolong efektif, dalam hal ini nampak pemerintah kota masih mengalami kesulitan meningkatkan EKD ini di atas 100 persen.

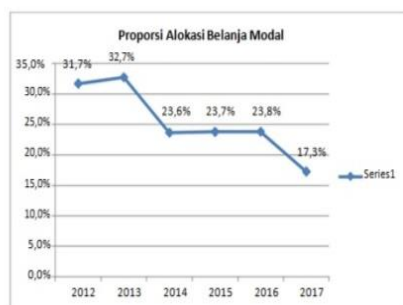


Gambar 2. Rasio EKD Kota Banjarmasin 2012-2017

Gambar 2. Rasio EKD Kota Banjarmasin 2012-2017

Untuk mengetahui kecenderungan naik-turunnya kinerja efektivitas keuangan kota Banjarmasin tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 2. Sejak tahun 2013 terjadi penurunan kinerja pencapaian target PAD ini hingga tahun 2016, baru kemudian tahun 2017 menunjukkan angka positif naik sebesar 11 persen. Berdasarkan tren ini, diharapkan akan terus terjadi peningkatan seiring upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk meningkatkan penerimaan dari PAD dan juga karena perekonomian yang semakin membaik.

Tren alokasi belanja modal pemerintah kota Banjarmasin tahun 2012-2017



Gambar 3. Proporsi Alokasi Belanja Modal

Gambar 3. Proporsi Alokasi Belanja Modal

Tren alokasi belanja modal (Tren ABM) digunakan untuk mengetahui arah perkembangan alokasi belanja modal tersebut. Berdasarkan Gambar 3. dapat diketahui proporsi alokasi belanja modal dari

tahun ke tahun, yang menunjukkan arah turun dan naiknya proporsi. Berdasarkan data ini, hanya tahun 2012 dan tahun 2013 proporsi belanja modal kota Banjarmasin diatas 30 persen sesuai ketentuan berlaku.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Kemendagri, kota Banjarmasin memperoleh status kinerja tinggi hingga sangat tinggi selama tahun 2012-2017. Pada tahun 2015, masuk peringkat 28 dari 30 kota tertinggi nasional. Capaian yang terendah diperoleh pada tahun 2012, yaitu peringkat 57 dari 91 kota. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan baik, dan secara umum pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah dilakukan secara baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.

Dilihat dari kemampuan keuangan daerah, kota Banjarmasin masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana perimbangan, yang berdasarkan analisis rasio kemandiriannya, kota Banjarmasin termasuk katagori konsultatif. Meskipun menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, secara tren terdapat tendensi terus meningkat positif.

Dari sisi efektivitas penggalan PAD, perbandingan antara realiasi dan target PAD di tiga tahun pertama ini menunjukkan kinerja yang efektif meskipun secara persentasi terjadi penurunan. Namun sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 terjadi penurunan kinerja, capaian PAD selama tiga tahun terakhir mengalami perubahan status yaitu tidak efektif, meskipun pada tahun 2017 capaian sebesar 100 persen cukup menunjukkan upaya signifikan untuk menjadi efektif lagi.

Berdasarkan analisis perhitungan rasio belanja modal dari tahun 2012 hingga 2017, proporsi belanja modal kota Banjar-

masin, proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang menunjukkan porsi belanja modal sebesar 32,7 persen, ini sesuai dengan kriteria minimal 30 persen sebagaimana ditetapkan Kemendagri. Tetapi pada tahun-tahun setelahnya terus menurun, bahkan tahun 2017 hanya mencapai 17,3 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran belanja banyak terserap untuk pembiayaan lainnya di luar infrastruktur.

Simpulan umum hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kinerja penyelenggaraan pemerintahan tergolong baik dan mendapat status sangat tinggi, kota Banjarmasin belum mampu memiliki kinerja keuangan yang baik khususnya aspek kemandirian, efektivitas capaian penerimaan PAD, dan proporsi alokasi belanja modal yang di bawah 30 persen.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian ini, direkomendasikan kepada pemerintah kota Banjarmasin agar memfokuskan kebijakan pada upaya peningkatan penerimaan PAD, dengan menggali potensi baru sumber-sumber pendapatan tanpa mengurangi potensi yang sudah ada. Penggunaan anggaran seharusnya memprioritaskan proporsi belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur yang menghasilkan atau meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga menghasilkan *outcome* berupa peningkatan pajak ataupun retribusi yang akan meningkatkan perolehan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abachi, P., dan I. Salamatu. 2012. An Analysis of The Effect of Fiscal Decentralisation on Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 2 No 8.
- Becker, S. D., T. Jagalla, dan P. Skærbæk. 2014. The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants' identities. *Critical perspectives on accounting* 25 (4):324-338.
- Da Cruz, N. F., dan R. C. Marques. 2014. Revisiting the determinants of local government performance. *Omega* 44:91-103.
- DJPK. 2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi keuangan daerah: akuntansi sektor publik Edisi ke 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- IFAC. 2016. *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2016 Edition, Vol.2* The International Public Sector Accounting Standards Board (IP-SASB®).
- Kelly, J. M. 2015. *Performance budgeting for state and local government: Me sharpe*.
- Mahmudi. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.
- Merina, C. I., dan M. Sari. 2016. Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi: Medan*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2014. edited by M. d. RB.
- Rahmayati, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA* Vol. 1 No. 1 Maret 2016.
- Risyanto, H. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004- 2013. *Coopetition*, Volume VI, Nomor 1, Maret 2015: 21- 33.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. edited by S. Edition. 7th ed. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Shapiro, S. P. 2005. Agency theory. *Annu. Rev. Sociol.* 31:263-284.

- Sinde, H. M. 2016. Decentralisation and Financial Performance: A Comparative Analysis of Local Governments' Financial Sustainability in Tanzania, University of Central Lancashire.
- Sundari, dan R. Supratinigrum. 2015. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). *Media Ekonomi dan Manajemen* Vol. 30 No. 1 Januari 2015.
- Syam, A. Y., L. Lisandri, F. Rizani, dan S. Oikawa. 2018a. Influence of PAD and DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable on Regency and Municipal Government in South Kalimantan Province. *Journal Research and Analysis: Economy* 1 (1):1-9.
- Syam, A. Y., F. Rizani, Lisandri, dan M. Maladi. 2018b. The Effect of Local Original Revenues, Special Allocation Funds, General Allocation Funds on The Human Development Quality And The Mediating Role of Capital Expenditure In Regency And Cities In South Kalimantan Province - Indonesia. Paper read at The 7th International Graduate Conference on Engineering, Science & Humanities 2018, Malaysia 13 -15 August at Malaysia, Johor Bahru.
- Watts, R. L., dan J. L Zimmerman. 1990. Positive accounting theory: a ten year perspective. *Accounting review*:131-156.